

Implementation of Road Infrastructure Development by the Village Government as an Effort to Improve Community Social Accessibility in Nagauleng Village, Cenrana District, Bone Regency

Jumiati^{1*}, Nurul Hikmah², Rahma Aulia Syafaririn³, Sulfa Reski⁴, Andi Sadriani⁵
Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

Corresponding Author: Jumiati Jumiati.tcellvivo@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Development, Infrastructure, Roads, Villages, Accessibility

Received : 27, February

Revised : 20, March

Accepted: 25, April

©2024, Jumiati, Hikmah, Syafiririn, Reski, Sadriani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Village government is expected to have an impact on improving the welfare of local village communities through the development of road infrastructure. This research aims to determine the role of the village government in developing road infrastructure in Nagauleng Village, Cenrana District, Bone Regency and to determine the facilitators and inhibitors of infrastructure development activities. Data analysis using an internal analysis model shows that the role of the village government in the development of Nagauleng village road infrastructure is still lacking and not optimal, this is due to a lack of planning, implementation and other supporting factors. On the other hand, inhibiting factors include a lack of oversight and monitoring of infrastructure development, a lack of budget from the government as well as difficult access and terrain where the location is a main road, this complicating the infrastructure development process which takes a lot of time.

Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah Desa Sebagai Upaya Perbaikan Aksesibilitas Sosial Masyarakat di Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone

Jumiati^{1*}, Nurul Hikmah², Rahma Aulia Syafaririn³, Sulfa Reski⁴, Andi Sadriani⁵
Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

Corresponding Author: Jumiati Jumiati.tcellvivo@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pembangunan, Infrastruktur, Jalan, Desa, Aksesibilitas.

Received : 27, February

Revised : 20, March

Accepted: 25, April

©2024, Jumiati, Hikmah, Syafiririn, Reski, Sadriani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pemerintahan desa diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat melalui pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Nagauleng Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone serta mengetahui fasilitator dan penghambat kegiatan pembangunan infrastruktur. Analisis data dengan menggunakan model analisis internal menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa Nagauleng masih kurang dan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan, pelaksanaan dan faktor pendukung lainnya. Di sisi lain, faktor penghambatnya antara lain kurangnya pengawasan dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur, kurangnya anggaran dari pemerintah serta akses dan medan yang sulit dimana lokasinya merupakan jalan poros sehingga mempersulit proses pembangunan infrastruktur yang memakan banyak waktu.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan cerminan keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pencapaian pembangunan yang optimal memerlukan adanya kesamaan pemahaman mengenai pembangunan melalui strategi yang berhasil. Dalam pembangunan sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan peran serta masyarakat. Otonomi berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan sebagai lembaga anggaran yang mandiri, dan meliputi tahapan-tahapan pembangunan. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Hasil. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pembangunan dapat diartikan sebagai inisiatif pertumbuhan dan perubahan yang secara sadar direncanakan dan dilaksanakan oleh negara-negara untuk melakukan modernisasi sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Desa adalah kesatuan kota terkecil yang sah, yang batas wilayahnya diakui dan dihormati oleh negara, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan suatu masyarakat berdasarkan tempat asal dan adat istiadat setempat. (Khasanah Izhar 2023).

Pembangunan pedesaan harus mengarah pada kesejahteraan. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah desa khususnya desa Karangseu lebih memperhatikan derajat kesehatan desa Nagauleng dari segi promosi masyarakat melalui prasarana jalan dan promosi kegiatan di desa tersebut. Pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, terutama melalui pemberian bimbingan, kepemimpinan, dukungan, pembinaan dan pengawasan. Komunitas dengan infrastruktur jalan yang baik sangat dominan dan digunakan masyarakat sehari-hari. Pemerintah daerah telah membentuk pemerintahan desa sebagai lembaga pemerintah dan memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan ini tercermin dari posisi strategis pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang mempunyai otonomi yang sesungguhnya. Angka ini dengan kuat menunjukkan bahwa kotamadya dan desa mempunyai hak dan tanggung jawab umum sehubungan dengan perubahan dan perbaikan pola pembangunan di wilayahnya. Hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya tidak hanya untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal yang efektif, namun juga untuk mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat masyarakat. (Setiawati and Farhani 2019) Pemerintahan desa bertugas mengatur urusan politik dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa Nomor Tahun 2014, Pasal 26 Ayat 1 menyebutkan Kepala Desa bertanggung jawab melaksanakan pembangunan desa. Kewenangan Desa mencakup di bidang penyelenggaraan pembangunan desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Mengharuskan desa untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pembangunan desa.

Masyarakat desa Nagauleng sangat mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan desa, dikarenakan jalanan yang rusak tersebut sangat menghambat aktifitas masyarakat setempat dimana jalanan tersebut merupakan jalan poros menuju kota dan sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut. Perbaikan infrastruktur jalan ini sangat diharapkan oleh masyarakat karena bukan aktivitas sosial masyarakat saja yang terganggu, namun mulai dari akses pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang terganggu. Salah satunya adalah akses terhadap infrastruktur yang baik memberikan dampak positif terhadap aktivitas warga dan komunitas.

Di sisi lain, jika infrastruktur tidak memadai, maka aktivitas warga dan komunitas lokal dapat terganggu, seperti terganggunya aktivitas petani lokal dalam mendatangkan hasil panen dan terganggunya aktivitas pendidikan siswa sekolah menengah, dampak negatif yang muncul pendidikan sekolah dan pembelajaran di sekolah dasar terganggu dan menyita banyak waktu, sehingga memperlambat proses belajar siswa, dan kondisi jalan yang buruk dapat membuat siswa ragu-ragu untuk datang ke sekolah. Tenaga pengajar yang berasal dari kota pun sering terhambat untuk datang mengajar ke desa dikarenakan jalanan yang kurang memadai. Dalam hal ini, aktivitas pengemudi dapat menyebabkan kecelakaan. Kemungkinan Karena kondisi jalan yang buruk, kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih besar. Pembangunan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkeadilan materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 artinya pengembangan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan. (Setiawati and Mone 2020) Undang- undang dan peraturan ini tidak bersifat membatasi dan tidak memberikan insentif yang cukup bagi masyarakat untuk berkembang menuju kemajuan yang dinamis. Akibatnya, bentuk dan struktur administrasi desa dan desanya masih beragam.

Berdasarkan observasi langsung penulis, kinerja pembangunan desa Kariango masih kurang optimal. Salah satunya terlihat dari kondisi infrastruktur yang ada secara umum masih belum memadai, khususnya infrastruktur jalan. Meski sebagian dan sebagian besar sudah rusak, namun masih ada lahan yang sulit dilintasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi saran dan masukan terhadap pembangunan di desa terkait pembangunan infrastruktur jalan yang harus di optimalkan karena banyak berpengaruh dalam berbagai linikehidupan masyarakat desa dan memungkinkan kemajuan desa tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Infrastruktur

Percepatan pembangunan daerah memerlukan dukungan dari berbagai faktor, termasuk pembangunan infrastruktur. Todaro (2000: 218) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan seperti pemerataan pembangunan, yang berdampak pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (Herman 2014) Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci kelancaran pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Tanpa infrastruktur yang memadai, proses pembangunan cenderung terhambat dan hasilnya kurang optimal.

Tentang pembangunan infrastruktur, pembangunan dan pelayanan umum di daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas nasional. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi daerah ditunjukkan dengan nilai manfaat dan manfaat infrastruktur. Hal ini terutama terlihat pada aksesibilitas yang menghubungkan sektor seperti administrasi publik, mobilitas ekonomi, dan transportasi.

Infrastruktur umumnya mencakup lembaga-lembaga publik yang didirikan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pegawai negeri untuk mendukung dan mendorong kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat (karena mekanisme pasar tidak berfungsi). (Sasmito 2017) Infrastruktur yang dikembangkan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara-negara maju tentu saja berbeda dengan yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang atau bahkan negara-negara kurang berkembang. Hal serupa juga terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan, kawasan industri dengan lahan pertanian, wilayah pesisir, dan wilayah kepulauan. Oleh karena itu, penulis dapat mendeskripsikan infrastruktur pedesaan sebagai sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah atau pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat. Contoh: jalan, jembatan, kendaraan, terminal, pelabuhan, dan lain-lain, bandar udara, perumahan, pasar, bank, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, air bersih, penerangan dan sanitasi. Hal ini mendorong terwujudnya kehidupan yang layak baik secara materi maupun masyarakat pedesaan dapat memberikan dukungan emosional.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan Analisis data melalui observasi dan wawancara. Dimana salah satu penulis merupakan salah seorang warga di desa tersebut yang sering mengakses jalan dan merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan oleh Pemerintah Desa

Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah desa melibatkan beberapa tahapan yang penting. Sebelum memulai pembangunan, dilakukan studi kelayakan yang mencakup analisis kebutuhan jalan desa, potensi pengembangan jalan desa, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, dan perkiraan jumlah penduduk yang akan menggunakan jalan. Bila hasil studi kelayakan menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah desa merupakan sarana yang paling mendasar untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Pembangunan jalan desa harus dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat. Sumber daya manusia dan finansial dapat disediakan dari pemerintah daerah. Struktur pemerintah desa juga harus disusun dengan baik untuk melakukan pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur jalan. (Arif Ferdian 2019)

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa harus memastikan bahwa informasi yang diumumkan kepada masyarakat dilakukan secara terang-terang. Faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur jalan desa antara lain adalah kebebasan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, dukungan finansial dari pemerintah daerah, dan lingkungan yang aman dan kondusif. (Tumbel, Mokot, and Podomi 2021)

Implementasi Pembangunan Struktur Jalan Desa

Berdasarkan hasil Penelitian melalui observasi dan wawancara di desa Nagauleng, pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa berhasil dan tepat karena informasi disampaikan secara terbuka kepada pemerintah desa dari komunitas.

1. Komunikasi

Pemuda warga Sompulolona Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, pada Selasa (5 April 2022) mengadu ke anggota DPRD Bone terkait rusaknya jalan utama di Desa Watu Nagauleng. Pengaduan tersebut disampaikan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) Komite III DPRD Bone. Rapat tersebut dihadiri oleh pemerintah desa dan sejumlah anggota dewan. Pak Arham atas nama warga menghimbau agar segera dilakukan perbaikan jalan rusak yang memakan banyak korban jiwa. Mereka juga menyerukan penutupan segera tambang-tambang yang tidak berizin.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil da sekitar 1,5 kilometer jalan rusak di Desa Watu Nagauleng yang rusak parah akibat aktivitas kendaraan penambangan, yang jelas merupakan tindakan ilegal dan tidak jarang kendaraan yang lewat terguling," kata Kepala Desa, kata Pak Arham. Kepala desa Nagauleng di provinsi Hamzah menanggapi permintaan warga dan meminta agar klaim tersebut dipertimbangkan kembali. Oleh karena itu, agar pembangunan jalan dapat memenuhi harapan, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, dukungan sumber daya keuangan dari pemerintah daerah, dan peningkatan keberlanjutan agar pembangunan infrastruktur Jalan Desa dapat terlaksana.

3. Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara pada Desa Nagauleng dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut yakni melalui proses pertukaran antara pemerintah desa dan masyarakat. Bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan Hasil dari Perjanjian Desa Nagauleng bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa. Hambatan dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Jalan Desa di Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, Berdasarkan kajian observasi dan wawancara di Desa Nagauleng. Faktor Pendukung terdapat dalam hal ini, dukungan warga dan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan menjadi motor penggerak keberhasilan

pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, dukungan finansial hubungan antar lembaga yang baik juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi, dimana dukungan finansial diberikan oleh pemerintah daerah dan desa jika diminta. (NSS, Suryawardana, and Triyani 2015) Dalam hal ini pengalokasian anggaran atau dana untuk pelaksanaan pembangunan yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa sangat mempengaruhi.

Faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan diantaranya kondisi jalanan desa nagauleng yang merupakan jalan utama setiap hari di akses oleh masyarakat menjadikan proses pembangunan jalan yang dapat memotong akses jalanan perlu pertimbangan yang matang dan harus dilakukan secara bertahap serta menyediakan alternatif jalan lain untuk warga setempat. Sempitnya akses menuju lokasi jika pada saat konstruksi akses jalan menuju lokasi terhambat, dan kondisi jalan sempit atau lalu lintas kendaraan tidak mencukupi, maka akan sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan jalan, sehingga pengemudi harus bergantian dan material konstruksi jalan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan jalan di desa. Anggaran dana desa yang kurang mencukupi juga menjadi penghambat.

Dampak Pembangunan Infrastruktur

Bagi masyarakat pedesaan, sarana transportasi nampaknya sangat penting untuk menghubungkan mereka dengan kota atau daerah lain (NSS, Suryawardana, and Triyani 2015). Jarak yang jauh antara desa dan kota menjadi kendala pertumbuhan daerah pedesaan. Tanpa transportasi, segalanya akan terasa sangat sulit. Hal ini sangat berpengaruh terlebih karena jalanan rusak di desa Nagauleng Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone merupakan jalan poros menuju kota dan akses pendidikan sekolah menengah. (Jamaluddin and Br Sinaga 2022). Maka dari itu perbaikan jalan diharapkan masyarakat setempat guna menghemat waktu saat bepergian, baik itu masyarakat yang ingin ke kota, pelajar dan tenaga pengajar yang ingin menuju sekolah maupun akses pelayanan Kesehatan yang terbatas di desa yang mengharuskan masyarakat ke kota. Namun karena akses jalan yang rusak dan kurang memadai sehingga dapat menghambat berbagai aktifitas masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah desa merupakan sarana yang paling mendasar untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Masyarakat desa Nagauleng mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan desa, dikarenakan jalanan yang rusak tersebut sangat menghambat aktifitas masyarakat setempat dimana jalanan tersebut merupakan jalan poros menuju kota dan sekolah-sekolah di desa tersebut. Perbaikan infrastruktur jalan ini diharapkan oleh masyarakat karena bukan aktivitas sosial masyarakat saja yang terganggu, namun dari akses pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang terganggu. Salah satunya akses terhadap infrastruktur yang memberikan dampak positif terhadap aktivitas warga. Aparat Desa memiliki peran besar terhadap keberlangsungan pembangunan. Dalam proses pembangunan jalan tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penelitian ini tentunya memiliki banyak keterbatasan sehingga penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk memperdalam referensi dan literatur yang digunakan serta observasi yang lebih mendalam terhadap penelitian Terkait pembangunan infrastruktur jalan desa yang diteliti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada rekan-rekan yang memberikan saran dan sumbangsi ide untuk penelitian ini serta kepada Dosen Pengampuh mata kuliah sosiologi pembangunan sehingga penelitian ini dapat di selesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ferdian, Kiki Reski. 2019. "Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 2 , No . 2 , Oktober 2019 Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal." *Public Administration Journal* 2(2): 39-44.
- Herman, Jimmy. 2014. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Kota Kutai Barat." *Jurnal Paradigma* 3(3): 282-90.
<https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/396%0Ahttps://ocs.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/396/356>.
- Jamaluddin, Yanhar, and Rizqy Aqilla Haya Br Sinaga. 2022. "Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021." *Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara* 1(1): 46-51.
- Khasanah Izhar, Dera. 2023. "Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Jurnal JISIPOL." *Ilmu Pemerintahan* 7(April): 4.
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/719/606>.
- NSS, Rr. Lulus Prapti, Edy Suryawardana, and Dian Triyani. 2015. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17(1): 82.
- Sasmito, Cahyo. 2017. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 6, No. 3 (2017) IMPLEMENTASI 6(3): 72. www.publikasi.unitri.ac.id.
- Setiawati, Budi, and Ahmad Farhani. 2019. "Analisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Analysis Performance Government of the Village for the Construction of Road Infrastructure." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 3(2): 8.
- Setiawati, Budi, and Ansyari Mone. 2020. "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang." 1: 498.
- Tumbel, Goinpeace, Jetty Mokot, and Ratni Podomi. 2021. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung." *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara* 1(2): 28-32.